PERBAIKAN DITERIMA
HARI : SENIN
TANGGAL : 8 JULI 2019
JAM : 14.48 WIB

ASLI

GOLONGAN KARYA

# DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 8 Juli 2019

**Kepada Yth.**

**Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi**

**Perkara Nomor: 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6**
**Jakarta Pusat**

Perihal : **PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Kabupaten Malang Dapil VI, Register Perkara Nomor: 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | **AIRLANGGA HARTARTO** |
| Jabatan | : | Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat/Tgl Lahir | : | 1 Oktober 1962 |
| Alamat | : | Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta |
| NIK | : | 3174070110620004 |
| Nomor Hp | : | 0818182268 |
| 2. Nama | : | **LODEWIJK F. PAULUS** |
| Jabatan | : | Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat/Tgl Lahir | : | 27 Juli 1957 |
| Alamat | : | Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta |

NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: SKK-40/DPP/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**MUHAMAD SATTU PALI, S.H.,M.H.**
**AHCMAD TOPAN SOEDIRJO, S.H.**
**AHMAD SUHERMAN, S.H.**
**ADRIANUS AGAL, S.H**
**IRWAN, S.H.**
**MUKMIN, S.H.**
**TOTOK PRASETIYANTO, S.H.**

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email: timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ----------**PIHAK TERKAIT;**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, untuk pengisian calon anggota DPRD Daerah Pemilihan

Malang 6 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam Register Perkara Nomor: 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh:

**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,** sepanjang terhadap Penghitungan Hasil Perolehan suara untuk Pengisian anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan Malang 6, selanjutnya disebut sebagai----------**PEMOHON;**

**M E L A W A N :**

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ---------- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Malang 6 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam Register Perkara Nomor: 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh:

**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,** sepanjang terhadap Penghitungan Hasil Perolehan suara untuk Pengisian anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan Malang 6, selanjutnya disebut sebagai----------**PEMOHON;**

**M E L A W A N :**

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ---------- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Kebangkitan Bangsa**, sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERMOHONAN

### DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MALANG 6

Bahwa penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Malang Dapil 6 Provinsi Jawa Timur, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALANG DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MALANG 6**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Malang 6;

2. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan perebutan kursi ke 8 di Daerah Pemilihan Kabupaten Malang 6 seharusnya diperoleh PEMOHON atas nama Calon Legislatif Nur Mutiah Faridah **adalah dalil yang sama sekali tidak beralasan hukum**. Selisih perolehan suara sah antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilahan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Malang 6 (Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA)adalah hasil dari proses pelaksanaan Pemungutan Suara yang langsung, bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum yang jujur dan adil;

3. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Lawang diperoleh secara tidak sah yang disebabkan adanya penggelembungan suara PIHAK TERKAIT di 26 TPS yang dilakukan oleh TERMOHON pada form DAA1, **adalah dalil yang mengada-ada.** Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan apapun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, tidak pula melaporkan adanya penggelembungan suara (*quod non*) sebagaimana didalilkannya kepada Gakumdu. Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON secara berjenjang di 26 TPS pada 9 (sembilan) desa di **Kecamatan Lawang** sebagaimana didalilkan PEMOHON yang sebenarnya adalah termuat dalam form C1 dan form DAA1 sebagaimana tabel persandingan di bawah ini:

| NO | DESA | TPS | PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Form C1 | | Form DAA1 | |
| | | | PT | P | PT | P |
| 1. | **BEDALI** | 6 | **94** | **28** | **94** | **28** |
| | | 23 | **63** | **26** | **63** | **26** |
| 2. | **SRI GADIN** | 15 | **114** | **13** | **114** | **13** |
| 3. | **SUMBER NGEPOH** | 2 | **57** | **21** | **57** | **21** |
| | | 4 | **52** | **30** | **52** | **30** |
| | | 12 | **53** | **7** | **53** | **7** |

| NO | DESA | TPS | PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Form C1 | | Form DAA1 | |
| | | | PT | P | PT | P |
| | | 13 | 72 | 9 | 72 | 9 |
| 4. | SIDODADI | 1 | 59 | 20 | 59 | 20 |
| | | 15 | 21 | 8 | 21 | 8 |
| | | 29 | | | 76 | 11 |
| 5. | KALIREJO | 3 | 49 | 8 | 39 | 8 |
| | | 17 | 41 | 21 | 41 | 21 |
| | | 29 | 46 | 13 | 46 | 13 |
| | | 33 | 68 | 5 | 68 | 5 |
| 6. | WONOREJO | 7 | 46 | 10 | 46 | 10 |
| | | 14 | 34 | 14 | 34 | 14 |
| | | 17 | 33 | 15 | 33 | 15 |
| | | 20 | 100 | 3 | 100 | 3 |
| 7. | TURIREJO | 10 | 35 | 10 | 65 | 31 |
| 8. | KETINDAN | 4 | 46 | 29 | 46 | 29 |
| | | 17 | 38 | 27 | 38 | 27 |
| | | 19 | 50 | 29 | 50 | 29 |
| 9. | LAWANG | 17 | 69 | 28 | 69 | 28 |
| | | 19 | 23 | 13 | 23 | 13 |
| | | 35 | 32 | 13 | 32 | 18 |
| | | 41 | | | 50 | 35 |
| TOTAL | | | | | | |

Secara menyeluruh persandingan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON di **Kecamatan Lawang** adalah sebagai berikut:

| NO | DESA | PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Form DAA1 | | Form DA1 | |
| | | PT | P | PT | P |
| 1. | KALIREJO | 2487 | 504 | 2487 | 504 |
| 2. | LAWANG | 1946 | 956 | 1946 | 956 |
| 3. | SIDOLUHUR | | | 974 | 665 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | **SRIGADING** | **1219** | **385** | **1219** | **385** |
| 5. | **SIDODADI** | **1242** | **576** | **1242** | **576** |
| 6. | **BEDALI** | **2339** | **1415** | **2339** | **1415** |
| 7. | **MULYOARJO** | | | **770** | **356** |
| 8. | **SUMBER NGEPOH** | **820** | **366** | **820** | **366** |
| 9. | **SUMBER PORONG** | | | **831** | **602** |
| 10. | **TURIREJO** | **647** | **862** | **647** | **862** |
| 11. | **KETINDAN** | **879** | **687** | **879** | **687** |
| 12. | **WONOREJO** | **1269** | **471** | **1269** | **471** |
| **T O T A L** | | | | **15423** | **7845** |

4. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Singosari diperoleh secara tidak sah karena adanya penggelembungan suara PIHAK TERKAIT di 8 TPS yang dilakukan oleh TERMOHON pada form DAA1, **adalah dalil yang mengada-ada FAKTANYA DI KECAMATAN SINGOSARI PEMOHON MEMPEROLEH SUARA LEBIH BANYAK DARI PIHAK TERKAIT.** Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan apapun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, tidak pula melaporkan adanya penggelembungan suara sebagaimana didalilkannya kepada Gakumdu (*quod non*). Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON secara berjenjang di 4 TPS **di Kecamatan Singosari** sebagaimana didalilkan PEMOHON (PEMOHON keliru karena mendalilkan Desa Lawang pada poin ini padahal desa Lawang terletak di Kecamatan Lawang) adalah termuat dalam persandingan form C1 dan form DAA1 sebagaimana tabel di bawah ini:

| **NO** | **DESA** | **TPS** | **PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Form C1** | | **Form DAA1** | |
| | | | **PT** | **P** | **PT** | **P** |
| 1. | **GUNUNG REJO** | 2 | **10** | **39** | **13** | **38** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 43 | 40 | 43 | 40 |
| 2. | **TOYOMARTO** | 19 | 29 | 52 | 32 | 52 |
| | | 27 | 63 | 20 | 63 | 20 |

Secara menyeluruh persandingan perbedaan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON di Kecamatan Singosari adalah sebagai berikut:

| NO | DESA | PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Form DAA1 | | Form DA1 | |
| | | PT | P | PT | P |
| 1. | **PANGENTAN** | | | 408 | 1869 |
| 2. | **LOSARI** | | | 241 | 463 |
| 3. | **CANDI RENGGO** | | | 1031 | 1380 |
| 4. | **WONOREJO** | | | 573 | 804 |
| 5. | **DENGKOL** | | | 752 | 1213 |
| 6. | **BATU RETNO** | | | 299 | 1369 |
| 7. | **WATU GEDE** | | | 373 | 794 |
| 8. | **BANJAR ARUM** | | | 869 | 1723 |
| 9. | **TUNJUNG TIRTO** | | | 392 | 678 |
| 10. | **LANG LANG** | | | 950 | 409 |
| 11. | **PURWO ASRI** | | | 311 | 496 |
| 12. | **KLAMPOK** | | | 1449 | 902 |
| 13. | **GUNUNG REJO** | 928 | 1111 | 928 | 1111 |
| 14. | **TAMAN HARJO** | | | 269 | 683 |
| 15. | **ARDY MULYO** | | | 512 | 964 |
| 16. | **TOYO MARTO** | 1208 | 1442 | 1208 | 1442 |
| 17. | **RANDU AGUNG** | | | 886 | 1705 |
| **TOTAL** | | | | 11451 | 18005 |

5. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT adalah karena penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON pada form DAA1 yang kemudian dituliskan ke dalam Form DA1 dan Form DB1 **adalah sama sekali tidak beralasan hukum**. Faktanya pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pengisian suara Partai Politik dan Caleg di tingkat TPS saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan;

6. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan adanya kecurangan pemilu di Dapil 6 Kabupaten Malang dimana pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg di tingkat Kabupaten **adalah mengada-ada**

**dan tidak beralasan hukum. Keberatan saksi PEMOHON tidak dapat ditindaklanjuti oleh TERMOHON adalah karena saksi PEMOHON atas nama Choirul Anam tidak dapat menunjukan bukti form C1 yang menjadi dasar keberatannya;**

7. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan selisih suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari sebanyak 636 (enam ratus tiga puluh enam) dikarenakan adanya penggelembungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT oleh TERMOHON adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada. PIHAK TERKAIT meyakini bahwa proses pemungutan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan Malang 6 sudah dilaksanakan oleh TERMOHON sesuai dengan peraturan dan perundangan dengan mengedepankan asas jujur dan adil;
8. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan perolehan suara Partai Politik dan Caleg sebanyak 39.130 (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh) suara lebih banyak/selisih 285 (dua ratus delapan puluh lima) dari PIHAK TERKAIT sehingga PEMOHON memperoleh 2 (dua) kursi di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang adalah mengada-ada dan tidak didasarkan pada penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg yang benar dan karenanya harus ditolak Mahkamah atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa perolehan suara dalam Pemilu untuk Pengisian anggota DPRD Kabupaten Malang Dapil Malang 6, PIHAK TERKAIT memperoleh suara lebih banyak dari PEMOHON, yaitu dengan selisih sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara sah sebagaimana Form Model DB1-DPRD Kabupaten Malang Dapil Malang 6 (VIDE Bukti PT.PG-4) adalah hasil dari Pemilihan Umum diselenggarakan oleh TERMOHON dengan menjunjung tinggi asas LUBER dan JURDIL;

## II. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukan bukti keberatannya pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten. PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan Malang 6 Provinsi Jawa Timur;

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami

**Kuasa PIHAK TERKAIT,**

**AHMAD SUHERMAN, S.H.**

**IRWAN, S.H.**

**MUKMIN, S.H.**

**TOTOK PRASETIYANTO, S.H.**